

**KEBIJAKAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN
(STUDI PADA WILAYAH HUKUM POLDA LAMPUNG)**

Erna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Lampung
Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Lampung
Email : ernadewi00@yahoo.co.id

Abstract

Police investigators have a very important role to determine whether a criminal offense and the prosecution can proceed to the next process or not, therefore, in terms of dealing with minor crime of theft is expected of a policy by the investigator, because the goal is not only legal merely emphasizes the rule of law but also kemanpaatan and justice, especially the law of Indonesia which is based on the Pancasila (National wisdom) and indigenous (local wisdom). The problem in this study were: 1). How policy shapes the national police criminal investigator for minor theft in Lampung regional police jurisdictions?; 2). Is the legal effect of the policy as a national police criminal investigation against theft light on the regional police law Lampung. Approach to problems is done by juridical and normative juridical approach to the source of empirical data either directly from informan as primary data and secondary data sourced from materials primary law, secondary legal materials and legal materials tertiary, as well as qualitative data analysis. Based on the results of research and discussion can be concluded, that the police in handling the current case to determine without prejudice to the policy with the law prior to minor theft offense, as it has ever done by the police against the perpetrators of Tanjung Bintang gum thief who was released on PTPN VII for the sake of humanity, while the legal effect of the policy is directly received positive response from the community that create a sense of justice and increase public confidence in the performance of the police, who had been deemed not impartial to the interests of society. From the above results it is suggested that future police in handling the case can not simply be mere juridical aspects, but also non-judicial aspects so that people will have more confidence in law enforcement agencies especially the police.

Keywords: Police Policy; Local Wisdom; Justice

Abstrak

Polri sebagai penyidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke penuntutan dan proses selanjutnya atautkah tidak, oleh karenanya dalam hal menangani tindak pidana pencurian ringan sangat diharapkan suatu kebijakan oleh pihak penyidik, karena cita hukum tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga kemanpaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila (National wisdom) dan kearifan lokal (local wisdom).

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimanakah bentuk kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan pada wilayah hukum polda lampung; 2). Apakah akibat hukum dari kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Pendekatan masalah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data baik secara langsung dari informan sebagai data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, bahwa polisi dalam menangani kasus saat ini perlu menentukan kebijakan dengan tanpa mengenyampingkan undang-undang. Terlebih terhadap tindak pidana pencurian ringan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Polsek Tanjung Bintang terhadap pelaku pencuri getah karet pada PTPN VII yang dibebaskan demi kemanusiaan, sedangkan akibat hukum dari kebijakan tersebut secara langsung mendapat sambutan positif dari masyarakat yaitu menimbulkan rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi, yang selama ini dianggap tidak memihak kepada kepentingan masyarakat. Dari hasil penelitian di atas disarankan agar kedepan polisi dalam menangani kasus tidak hanya dilihat dari aspek yuridis semata, tetapi juga aspek non yuridis sehingga masyarakat akan lebih percaya pada lembaga penegak hukum terutama polisi.

Kata Kunci: Kebijakan Polri; Kearifan Lokal; Keadilan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Polisi Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum yang menduduki urutan pertama dalam sistem peradilan pidana, dalam kiprahnya tidak dapat terlepas dari sikap dan perilaku sebagai aparat penegak hukum yang selalu mengundang perhatian masyarakat, untuk mengikuti gerak-geriknya dalam menegakkan hukum. Satjipto Rahardjo dalam hal ini mengungkapkan: "di antara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum pekerjaan polisi adalah paling menarik, karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan, Polisi pada hakekatnya bisa dilihat sebagai hukum yang hidup karena memang ditangan polisi itulah hukum mengalami perwujudan yang setidak-tidaknya di bidang hukum pidana. Apabila hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat diantaranya dengan melawan kejahatan, maka pada akhirnya polisi itulah yang akan menentukan apa itu yang secara konkrit sebagai penegak ketertiban, siapa-siapa yang harus ditundukkan, siapa-siapa yang harus dilindungi dan seterusnya¹ Demikian juga Soerjono Soekanto mengatakan: apa yang digambarkan di atas paling tidak memang demikianlah pandangan masyarakat terhadap aparat penegak hukum (polisi) hal ini disebabkan ada kecendrungan yang kuat dikalangan masyarakat

untuk mengartikan sebagai petugas atau penegak hukum²

Keberadaan hukum saat ini sangat dirasakan penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum tidak hanya berperan untuk keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Hukum dalam mencapai tujuannya lebih diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan hukum yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni hukum yang dapat menciptakan kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Suatu asumsi dasar yang harus dipahami dalam penataan hukum atau suatu kebijakan, bahwa fungsi hukum bukan semata-mata dilihat dari segi yuridis formal dan sanksinya belaka, akan tetapi suatu norma hukum akan berfungsi secara efektif apabila dijunjung dan dipatuhi oleh setiap orang dalam setiap bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial dan kondisi-kondisi yang relevan lainnya. Seperti halnya tindak pidana pencurian ringan yang dewasa ini semakin marak dimana hampir setiap hari diberitakan baik melalui media cetak maupun elektronik, bahwa saat

1. Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru. hlm. 95.

2. Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali. hlm 27.

ini masyarakat miskin/kurang mampu dari sisi ekonomi melakukan tindak pidana ringan, sebagai contoh kasus mbah minah mencuri kakau, kasus mencuri bochlam listrik di Baandar Lampung, mencuri getah karet di PTPN VII Tanjung Bintang lampung selatan. Hal ini merupakan akibat dari krisis ekonomi global, sehingga banyak orang melakukan apa saja demi kebutuhan hidup. Kehadiran aparat penegak hukum sangat diharapkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat guna menekan lajunya tindak pidana.

Mengingat pentingnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat demi kelancaran pembangunan, lebih-lebih dalam menghadapi globalisasi, maka diperlukan alat pengontrol yaitu hukum pidana, karena hukum pidana merupakan salah satu alat yang sangat ampuh untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan tindak pidana harus ditingkatkan, terutama peran dari penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana polri sebagai penyidik mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke penuntutan dan proses selanjutnya ataukah tidak, oleh karenanya dalam hal menangani tindak pidana pencurian ringan sangat diharapkan suatu kebijakan oleh pihak penyidik, karena cita hukum tidak hanya semata-mata menekankan pada kepastian hukum tetapi juga kemanpaatan dan keadilan, terlebih hukum Indonesia yang berlandaskan kepada Pancasila (*National wisdom*) dan kearifan lokal (*local wisdom*)

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul Kebijakan Polri sebagai penyidik terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan dalam Mewujudkan Keadilan (Studi pada Wilayah Hukum Polda lampung).

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polda Lampung?
2. Apakah akibat hukum dari kebijakan polri sebagai penyidik terhadap pelaku maupun korban tindak

pidana pencurian ringan?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggabungkan *doctrinal research* (penelitian hukum normatif) dan penelitian *socio-legal-research* (penelitian hukum empiris), dasar dari penelitian doctrinal adalah penelitian pustaka yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu KUHP dan KUHPA, bahan hukum sekunder yang terdiri dari putusan – putusan pengadilan serta bahan hukum tersier yang bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kamus. Bahan hukum tersebut merupakan data sekunder, sedangkan data primer diperoleh dari para informan yang merupakan data pendukung. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

3. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

1. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) dari P. Hoefnagels, A. Mulder dan Soerjono Soekanto.
2. Teori Penegakan Hukum dari J. Goeldstein.
3. Pandangan/Aliran monoistis dan dualistis tentang unsur-unsur tindak pidana.
4. Pengaturan tentang tindak pidana pencurian ringan dalam KUHP.
5. Tugas Polri sebagaimana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Wilayah Hukum Polda Lampung

Sebagai penegak hukum, polisi sebagai penyidik yang berfungsi sebagai penjaga gawang, atau penentu untuk dapat lanjut atau tidaknya suatu perkara pada proses berikutnya perlu menentukan suatu kebijakan dengan memperhatikan berbagai aspek antara lain aspek yuridis dan aspek non-yuridis

atau yang dikenal dengan pendapat Muladi tentang aspek ekstra yuridis termasuk aspek sosiologis, antropologis (kearifan lokal/hukum adat setempat). Uraian di atas sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan para informan, hal mana apabila polisi sebagai penyidik dalam menjalankan tugas untuk saat ini masih cenderung mengutamakan kepastian hukum (asas legalitas formal) dengan mengenyampingkan keadilan, oleh karenanya dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik tidak semata-mata memperhatikan aspek yuridis tetapi juga aspek non-yuridis yang disesuaikan dengan kearifan lokal maupun kearifan nasional yaitu nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan dapat dikaji dari dua upaya, yang terdiri dari:

a. Upaya penal

Marc Ancel menyatakan, bahwa "*modern criminal science*" terdiri dari tiga komponen, yaitu; "*criminology, criminal law, penal policy*". Marc Ancel juga pernah mengemukakan mengenai kebijakan hukum pidana "*penal policy*" sebagaimana yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief³, bahwa:

"*penal policy*", adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan"

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-

peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Bertolak dari pengertian di atas politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Maka politik hukum pidana itu mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. hal ini sejalan dengan pendapat A. Mulder yang menyatakan kebijakan hukum pidana, adalah untuk menentukan seberapa jauh ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta bagaimana tugas penegak hukum dapat dilaksanakan. Demikian juga dengan Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa politik hukum pidana merupakan upaya untuk secara rasional mengorganisasikan reaksi-reaksi sosial terhadap delinkuensi dan kejahatan.⁴

Berdasarkan wawancara penulis dengan para informan, bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan tugas polisi sebagai penyidik cenderung menggunakan kebijakan penal yaitu asas legalitas formal, setiap kasus yang dilaporkan tetap harus di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. upaya non-penal

Kebijakan kriminal yang menggunakan sarana non-penal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif sebagai penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang

3. Loc. Cit. hlm 21

4. Op.Cit.hlm 3

secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat menjadi faktor kondusif timbulnya kejahatan tidak dapat diatasi semata-mata dengan upaya penal, karena keterbatasan upaya penal, oleh karena itu harus ditunjang dengan upaya non-penal untuk mengatasi berbagai masalah sosial maupun kejahatan.

Penanggulangan kejahatan menggunakan upaya non-penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan "*extra-legal system*" atau "*informal and traditional system*" yang ada dalam masyarakat. Selain upaya penal juga dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif.

Kemudian ada sumber lain misalnya partisipasi media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek-preventif dari aparat penegak hukum, menurut Sudarto,⁵ bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinyu termasuk upaya non-penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat.

Berdasarkan uraian di atas mengenai upaya non-penal dalam kebijakan penanggulangan kejahatan, sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan para informan dan cukup beralasan kiranya untuk terus menerus, menggali, memanfaatkan dan mengembangkan upaya-upaya non-penal untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan dari sara penal yang ada. Adapun upaya non-penal yang dilakukan antara lain dilakukan kegiatan patrol rutin, Sosialisasi undang-undang atau penyuluhan hukum

dan kegiatan polmas. Upaya tersebut sejalan dengan Surat Kapolri No. Pol.B/3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 4 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui mediasi penal atau penyelesaian di luar perkara (ADR).

Adapun contoh kasus yang diselesaikan melalui kebijakan polri sebagaimana yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanjung Bintang;

1. Nama : Sumini binti Paiman
 Umur : 54 tahun
 Alamat : Wonodadi Blok II Kecamatan Tj. Sari Tanjung Bintang
 Pekerjaan : Tani
 Kasus : Pencurian Getah Karet seberat 10 kg (Pasal 362 KUHP)

2. Nama : Septian Andika bin Tardi
 Umur : 12 tahun
 Alamat : Purwodadi Simpang Tj. Bintang
 Pendidikan : Kls 6 SDN Tanjung Bintang
 Kasus : Pencurian Getah Karet seberat 8 kg (Pasal 362 KUHP).

Terhadap kedua kasus di atas oleh Polsek Tanjung Bintang tidak diselesaikan melalui upaya penal, tetapi diselesaikan dengan suatu kebijakan melalui kearifan lokal dengan langkah-langkah:

1. Untuk kasus no 1 si pelaku membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan keterangan lurah, surat perdamaian pihak-pihak yaitu pihak pelaku dan korban (untuk kasus ini PTPN VII pernyataannya secara lisan yaitu menyerahkan kepada pihak penyidik untuk mengambil langkah yang terbaik. Oleh penyidik pelaku tersebut dibebaskan dengan pertimbangan: Kemanusiaan, usia lanjut serta dilihat dari nilai barang yang dicuri tersebut.
2. Untuk kasus no. 2 si pelaku diwakili oleh orangtuanya untuk membuat surat pernyataan orang tua untuk mendidik anak supaya tidak melakukan tindak pidana lagi; membuat keterangan dari sekolah dan kelurahan

5. Op.Cit.hlm 50

(pengganti Litmasy), anak tersebut dikembalikan ke orang tua untuk didik dan dibina supaya lebih baik.

3. Akibat Hukum dari Kebijakan Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan

Polisi sebagai penyidik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pengayom, pelindung dan mitra masyarakat selalu dihadapkan dengan berbagai kendala, baik kendala yang datang dari aspek yuridis atau peraturan perundang-undangan yang tidak menjangkau ketentuan hukum adat atau kebiasaan setempat terlebih Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang masih merupakan peninggalan jajahan yang tentunya sudah tidak cocok dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang mempunyai kearifan lokal dan Pancasila yang merupakan kearifan nasional, serta kendala dari aspek non-yuridis/ekstra yuridis, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, agama. Oleh karenanya perlu adanya kebijakan Polri terlebih terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Adapun akibat hukum dari adanya kebijakan polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap para informan, antara lain:

1. Terjadinya penyelesaian koinflik, hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya kebijakan polri baik melalui upaya penal maupun non – penal diharapkan membuahkan hasil para pihak dalam hal ini pelaku tindak pidana, korban maupun masyarakat merasakan damai karena konflik atau pertikayan yang terjadi sudah dianggap selesai dengan adanya kebijakan yang dilakukan polri, contoh sebagaimana yang terjadi di Polsek Tanjung Bintang dengan kasus pencurian getah karet yang dilakukan oleh: Sumini binti Paiman (54 tahun) di bebaskan dengan pertimbangan kemanusiaan, usia dan nilai barang yang dicuri. dan Septian Andika bin Tardi (12 tahun) di kembalikan pada orang tua karena usia di bawah umur.
2. Fihak-fihak baik pelaku maupun korban dan juga masyarakat merasa lebih adil; dengan adanya

kebijakan polri terutama kebijakan non – penal (melalui mediasi penal) baik fihak pelaku maupun korban serta masyarakat merasa lebih adil, hal ini dilihat dari berbagai faktor; antara lain factor ekonomi, usia, serta nilai benda yang dicuri. Tetapi apabila factor Tempat Kejadian Perkara tidak menyetujui adanya penyelesaian damai atau mediasi penal, maka kasus tersebut tetap diselesaikan melalui proses peradilan atau jalur penal, sebagai contoh kasus pencurian Hand Pon (HP) di Rumah sakit Urip Soemoharjo di Bandar Lampung terhadap kasus tersebut tetap di teruskan melalui proses peradilan, hal ini disebabkan karena pihak rumah sakit tidak setuju untuk dilakukan damai, khawatir apabila terjadi damai, maka dikhawatirkan pencuri-pencuri baru akan bermunculan sehingga para pasien dan petugas Rumah Sakit tidak nyaman dan tenang dalam bekerja.

3. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama polri semakin meningkat, karena dengan adanya kebijakan polri tersebut kesan dan paradigma msyarakat selama ini terhadap polri akan berubah terlebih dengan adanya kegiatan polisi masyarakat (polmas).
4. Masuknya kearifan lokal dalam penyelesaian kasus pidana, dengan adanya kebijakan polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan yang “dapat” diselesaikan melalui “mediasi penal” dipandang sesuai dengan kearifan lokal, yaitu dengan memberlakukan kebiasaan, keyakinan dan cara penyelesaian kasus yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat akan dirasakan lebih adil, ketimbang harus di proses melalui proses peradilan pidana.
5. Tercapainya cita hukum sehingga dapat terwujud supremasi hukum.

Dengan adanya kebijakan polri yang dirasakan lebih adil oleh pihak-pihak dan juga masyarakat hal ini sejalan dengan cita hukum yang disampaikan oleh G. Radbruch, bahwa cita hukum terdiri dari: kepastian hukum; kemamfaatan dan keadilan. Dengan tercapainya keadilan dengan sendirinya supremasi hukum pun

dapat tercapai atau terwujud.

Dengan demikian ke lima akibat hukum di atas, semuanya mencerminkan tujuan dan cita hukum yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, mengingat selama ini penegakan hukum selalu berstandar kepada kepastian hukum dengan mengabaikan keadilan, hal ini disebabkan aturan hukum yang dijadikan dasar atau acuan terutama KUHP masih menggunakan KUHP peninggalan Belanda yang tentunya sudah banyak yang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia, sedangkan hukum yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah Sistem Hukum dan Sistem Hukum Pidana yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa:

1. Bentuk kebijakan polri yang terdiri dari kebijakan penal dan non penal atau kebijakan dari aspek yuridis dan non yuridis, sehingga kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat, baik dari pihak korban maupun pelaku dan dirasakan lebih bijak atau adil, adapun bentruk dari kebijakan polri tersebut dapat berupa mediasi penal sesuai dengan Surat/Telegram Kapolri No. Pol B./3022/XII/2009/SDEOPS tertanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan kasus di luar pengadilan terutama berkaitan dengan tindak pidana ringan dengan memperhatikan kearifan lokal dan kearifan nasional yaitu Pancasila.
2. Akibat hukum dari kebijakan polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan antara lain:
 - a. Terjadinya penyelesaian konflik;
 - b. Fihak-fihak baik pelaku maupun korban dan juga masyarakat merasa lebih adil;
 - c. Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum terutama polri semakin meningkat;
 - d. Masuknya kearifan lokal dalam penyelesaian perkara pidana (mediasi penal);
 - e. Tercapainya cita hukum sehingga dapat terwujudnya supremasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam R., 2009, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum Yang Telah Direvisi*, Jakarta.: Restu Agung.
- Arief, Barda N dan Muladi, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Arief, Barda N., 2001, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Arief, Barda N. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana
- Arief, Barda N, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.*, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Arief, Barda N., 2010. *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan HUKUM (Pidana) Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Muladi., 2002, *Demokrasi, Hak Asasi manusia, dan reformasi Hukum di Indonesia.*. Jakarta: The Habibie Center.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni
- Rahardjo, Satjipto 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru
- Rahardjo, Satjipto, 2007. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Sisi Lain Hukum di Indonseia* Jakarta: .PT. Kompas Media Nusantara
- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum Progresif suatu Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto, 1960, *Hukum Pidana 1*, Semarang; BP. Undip.
- Soekanto, Soerjono , 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Viano, Emilio C., 1976, *Victims And Society*. Washington D.C.: Visage Press,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar NKRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.